



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis IMTAQ									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan layanan pembangunan yang berbasis IMTAQ			1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks (Xi) = $(Xi - Xmin) / (Xmaks - Xmin)$	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan
		1	Indeks Toleransi	2	Kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	2	Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama	Jumlah konflik SARA yang ditangani/Total Jumlah konflik SARA x 100%	Badan KesbangPol
2. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran kesehatan masyarakat									

2	Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat secara berkelanjutan	2	Indeks Kesehatan Keluarga	3	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Nilai rata - rata hasil survey kepuasan pelanggan di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran
						4	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi usia 0 - 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
						5	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Jumlah Balita yang menurut indikator berat badan menurut umur ambang batas status gizinya berada di - 3 standar deviasi s/d < -2 standar deviasi	Dinas Kesehatan

3	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Rapi dan Tertib	3	Kualitas Lingkungan Hidup	4	Meningkatnya lingkungan yang rapi dan tertib	6	Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Luas permukiman kumuh ditangani dibagi jumlah luas permukiman kumuh X 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						7	Persentase Penanganan Sampah	Volume sampah yang ditangani (M3) / Volume produksi sampah (M3) X 100%	Dinas Lingkungan Hidup
						8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi dibagi jumlah dokumen lingkungan kali 100%	Dinas Lingkungan Hidup
						9	Persentase korban angka kecelakaan fatal	Jumlah angka kecelakaan yang mengakibatkan korban/ jumlah total angka kecelakaan x 100%	Dinas Perhubungan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan

4	Terwujudnya Pendidikan Yang Unggul, Terjangkau dan Merata	4	Indeks Pendidikan	5	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	10	APK PAUD	Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia/ jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100%	Dinas Pendidikan
						11	APK SD/MI/Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A berbagai usia/ jumlah penduduk usia jenjang SD/MI/Paket A x 100%	Dinas Pendidikan
						12	APM SD/MI/Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia usia 7-12 tahun / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Dinas Pendidikan
						13	APK SMP/MTS/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/MTS/ Paket B berbagai usia/ jumlah penduduk usia jenjang SMP/MTS/ Paket B x 100%	
						14	APM SMP/MTS/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/MTS/Paket B usia usia 13-15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%	Dinas Pendidikan

						15	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP, MTS / jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya x 100%	Dinas Pendidikan
						16	Angka Melek Huruf (AMH)	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun	Dinas Pendidikan
						17	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
						18	Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTS yang terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTS yang sdh terakreditasi / jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTS yang belum terakreditasi x 100%	Dinas Pendidikan
						19	Persentase guru memenuhi kualifikasi S1 dan D4	Jumlah guru lulusan sarjana / jumlah guru x 100%	Dinas Pendidikan

						20	Rata-rata nilai UN SD/MI dan SMP/MTS	Total nilai UN siswa / Jumlah siswa	Dinas Pendidikan
4. Mengembangkan pola pembangunan yang partisipatif, proaktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan ditengah kompetisi global									
5	Mewujudkan Pembangunan Yang Aspiratif, Partisipatif serta mendorong peningkatan kesempatan kerja masyarakat	5	Indeks Desa Membangun	6	Meningkatnya laju investasi yang mempengaruhi penurunan tingkat kesenjangan	21	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_i [Y_i + Y_{i-1}]$; GR=Koefisien Gini, f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i ; Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan
						22	Nilai Investasi berskala Nasional PMA	Jumlah Investasi Berskala Nasional, PMA	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						23	Nilai Investasi berskala Nasional PMDN	Jumlah Investasi Berskala Nasional, PMDN	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						24	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin tahun n	Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Asahan

				7	Meningkatnya kesempatan kerja	25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angkatan kerja / Penduduk usia kerja x100	Dinas Tenaga Kerja
						26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur/Jumlah angkatan kerja x 100	Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Asahan
5. Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal.									
6	Mewujudkan Pengelolaan Kemajemukan Masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal	6	Indeks Gotong royong	8	Terpeliharanya seni budaya lokal	27	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
						28	Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan	Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
6. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan									
7	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan	7	Peringkat Reformasi Birokrasi			29	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun n	Bagian Organisasi

				9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	30	Nilai LPPD oleh Tim EKPPD	Hasil Penilaian Evaluasi Tim EKPPD	Bagian Pemerintahan
						31	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah (WTP, WDP)	BPKAD
						32	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP / Total OPD x 100%	Inspektorat

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

8	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Lainnya yang berwawasan lingkungan	8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	10	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan, permukiman, sanitasi dan lingkungan	33	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruhnya X 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
---	--	---	---------------------------------------	----	---	----	--	--	---

						34	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum	Jumlah penduduk terlayani air bersih dibagi jumlah seluruh penduduk X 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PDAM
						35	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik / Total Panjang Irigasi Kabupaten x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						36	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas di kawasan perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas di kawasan perkotaan / Luas Ruang Terbuka Hijau Publik kawasan perkotaan X 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						37	Rumah Layak Huni (%)	Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100 %	Dinas Sosial

8. Mendorong terciptanya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat

9	Mewujudkan Ketertiban, keadilan, perlindungan dan Pelayanan Sosial ditengah tengah masyarakat	9	Indeks Rasa Aman	11	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	38	Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaikan	Korban kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan penanganannya / Korban kekerasan Perempuan dan Anak yang melapor x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						39	Persentase penurunan PMKS	$\frac{\text{PMKS thn (n)} - \text{thn (n-1)}}{\text{PMKS thn (n-1)}} \times 100$	Dinas Sosial
						40	Persentase Penanganan PMKS	PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial
						41	Persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana/Jumlah Desa Rawan Bencana x 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						42	Tingkat penanganan kejadian kebakaran (persen)	Jumlah penanganan kejadian kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

					43	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan dan tiba di lokasi)	Satuan Polisi Pamong Praja
							Jumlah Penanganan Kejadian Bencana yang tertangani/Jumlah kejadian Bencana x 100	
					44	Tingkat Penanganan Kejadian Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Meningkatkan daya saing pertanian dalam arti luas									
10	Mewujudkan peningkatan produksi dan daya saing pertanian dalam arti luas	10	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	12	Tercukupinya Kebutuhan Utama Beras	45	Kebutuhan Pangan Utama Beras (ton)	63,20% X Produksi padi (GKG)	Dinas Ketahanan Pangan
				13	Meningkatnya penyerapan pangan	46	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten	Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)	Dinas Ketahanan Pangan
				14	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	47	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NTB (i)	Dinas Pertanian
				15	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	48	Ketersediaan Pangan (Ton)	Jumlah ketersediaan Pangan (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan
							- Beras		
							- Daging		
							- Telur		
							- Ikan		
10. Melakukan percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah yang dipadukan dengan koperasi dan UKM, pariwisata, perdagangan, industri, pembangunan pasar tradisional dan modern.									

11	Mewujudkan peningkatan peranan koperasi, UKM, Pariwisata, dan Investasi	11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	16	Meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui peran koperasi dan UKM	49	Persentase Koperasi Aktif	jumlah koperasi aktif / jumlah seluruh koperasi x 100 %	Dinas Koperasi dan Perdagangan
				17	Meningkatnya Potensi Pariwisata	50	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Daerah	Sewa tempat, parkir dan sewa wahana wisata	Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata
				18	Tersedianya akses perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	51	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB sektor perdagangan / Jumlah PDRB x 100 %	Dinas Koperasi dan Perdagangan
						52	Persentase Usaha Mikro kecil	Jumlah Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Perdagangan
						53	Laju Inflasi	Laju inflasi = (Indeks Harga periode n – Indeks Harga Periode sebelumnya) / Indeks Harga Periode sebelumnya x 100%	Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Asahan
				19	Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian	54	Tingkat Pertumbuhan Industri Mikro (%)	Jumlah Industri tahun n - jumlah industri tahun (n-1) / jumlah industri n-1 x 100%	Dinas Ketenagakerjaan

						55	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB sektor industri /Jumlah PDRB x 100 %	Dinas Ketenagakerjaan
--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------

BUPATI ASAHAN,

SURYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan BPKP Provinsi Sumatera Utara
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Capaian Laporan Kinerja (LKJ)	Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja sesuai dengan Permenpan No. No 53 Tahun 2014	Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Asahan	Persentase Jumlah Anggota DPRD kabupaten Asahan yang Melaksanakan Reses	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Reses / Jumlah Anggota Dewan x 100%	Dokumen hasil Reses
		Persentase Jumlah Anggota DPRD kabupaten Asahan yang Melaksanakan Kunjungan Kerja	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Kunker / Jumlah Anggota Dewan x 100%	Dokumen RKPD dan DPA SKPD

	Persetase Jumlah Ranperda yang disetujui bersama DPRD dan Bupati Asahan	Jumlah Ranperda yang disetujui / Ranperda yang direncanakan x 100%	Dokumen RKPD dan DPA SKPD
	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD kab. Asahan	Jumlah Rancangan Peraturan yang ditetapkan / Rancangan Peraturan yang rencanakan x 100%	Dokumen RKPD dan DPA SKPD
	Persentase Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mengikuti BIMTEK	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Bimtek / Jumlah Anggota Dewan x 100%	Dokumen RKPD dan DPA SKPD

3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang mendapat temuan kerugian daerah yang material.	(Jumlah OPD yang mendapat temuan kerugian daerah yang material dibagi jumlah OPD yang diperiksa) dikali 100%	LHP BPK RI
		Persentase OPD yang mendapat temuan barang/aset yang material	(Jumlah OPD yang mendapat temuan barang/aset yang material dibagi jumlah OPD yang diperiksa) dikali 100%	LHP BPK RI
2.	Meningkatnya pengimplementasian SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	(Jumlah OPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dibagi Jumlah Seluruh OPD) dikali 100%	Bagian Organisasi
3.	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	(Jumlah pengaduan masyarakat yang berkadar pen gawasan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang diterima) dikali 100%	Laporan Pengaduan
4.	Meningkatnya permintaan layanan konsultasi	Permintaan layanan konsultasi	Jumlah permintaan layanan konsultasi	Surat Masuk

5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	LHP BPK RI
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	LHP Irjen, BPKP, Itprovsu dan Insp. Kab.
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	(Jumlah OPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B dibagi jumlah seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Asahan yang dievaluasi) x 100%	LHE dan KKE

4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	APK PAUD	Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 %	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/ Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/MTs/Paket B berbagai usia/ jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
		APM SD/MI/ Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan

		APM SMP/MTs/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP, MTs / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya x 100 %	Dinas Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan/BPS
		Angka Melek Huruf (AMH)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa baca tulis / Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Dinas Pendidikan/BPS
2	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang sudah akreditasi / Jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang belum akreditasi x 100 %	Dinas Pendidikan
		Persentase guru memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru lulusan sarjana / Jumlah guru x 100 %	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SD/MI dan SMP/MTs	Total nilai UN siswa / Jumlah siswa	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya pelestarian objek tradisi	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
		Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan	Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 %	Dinas Pendidikan
		Nilai Evaluasi AKIP	Jumlah nilai evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan

	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey kepada masyarakat	Dinas Pendidikan
--	----------------------------	--------------------------------------	------------------

5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Jumlah Balita yang menurut indikator BB menurut umur ambang batas status gizinya berada di -3 SD s/d - 2 SD	Dinas Kesehatan
2	Menurunnya Angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit	Persentase Penurunan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah Penderita DBD di suatu wilayah tertentu	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM $\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan STBM}}{\text{Jumlah Seluruh desa}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Jumlah Rumah Tangga yang ber PHBS $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang ber PHBS}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang di pantau}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Siaga Aktif	Jumlah Desa Siaga Aktif $\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Desa di suatu wilayah pada waktu tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%	Dinas PUPR

2	Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sistem irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah total jaringan irigasi kabupaten dikali 100%	Dinas PUPR
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Mengarahkan perwujudan tertib penataan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Pertambahan jumlah unit gedung yang memiliki IMB	Dinas PUPR
4	Meningkatkan pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau	Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berkualitas di kawasan perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang baik dibagi jumlah luas ruang terbuka hijau perkotaan dikali 100%	Dinas PUPR
5	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik dan aparatur	Persentase bangunan pelayanan publik dan aparatur berfungsi baik	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik dibagi jumlah seluruh bangunan pelayanan publik dikali 100%	Dinas PUPR

7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Berkurangnya rumah tidak layak huni	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH tertangani dibagi Jumlah keseluruhan RTLH dikali 100 %	Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman (PP No. 6 Tahun 2008)	Jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100 %	Data Penanganan Layanan Air Minum
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (PP No. 6 Tahun 2008)	Luas permukiman kumuh ditangani dibagi jumlah luas permukiman kumuh dikali 100%	Data Penanganan Permukiman Kumuh

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya keamanan dan ketentraman lingkungan	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat	Jumlah gangguan trantibum diselesaikan/Jumlah gangguan trantibum x 100%	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Pelindungan Masyarakat
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Asahan	Jumlah operasional Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan Satpol PP Kab. Asahan dalam setahun	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
3	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan berkelanjutan	Tingkat penanganan kejadian kebakaran (persen)	Jumlah penanganan kejadian kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	Bidang Pemadam Kebakaran
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan dan tiba di lokasi)	Bidang Pemadam Kebakaran

9. DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni/ Jumlah seluruh rumah x 100	Dinas Sosial
2	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)	ang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun/ Jumlah seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100	Dinas Sosial

10. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%	Dinas Ketenagakerjaan
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah penempatan tenaga kerja dibagi Jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	Dinas Ketenagakerjaan
		Jumlah lowongan pekerjaan baru	Jumlah lowongan kerja terdaftar	Dinas Ketenagakerjaan
3	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Dinas Ketenagakerjaan
4	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi Jumlah kasus yang masuk dikali 100%	Dinas Ketenagakerjaan
5	Meningkatnya kualitas IKM yang berdaya saing	Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah kelompok IKM yang terbina	Dinas Ketenagakerjaan

11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peserta KB	Cakupan Pus Menjadi Peserta KB	Pasangan Usia Subur memakai alat kontrasepsi sampai saat ini	Dinas PPKBP3A
		Rasio Akseptor KB	Pasangan Usia Subur dibagi Peserta KB	Dinas PPKBP3A
		Jumlah Pus terlayani kontrasepsi	Pasangan Usia Subur pertama kali memakai alat kontrasepsi	Dinas PPKBP3A
	Menurunnya Rata Rata Angka Kelahiran	TFR	5 kali ASFR per 1000 orang perempuan	BPS Asahan

		Jumlah rata-rata anak per Keluarga	Jumlah anak dilahirkan dibagi kepala Keluarga	Dinas PPKBP3A
2	Meningkatnya Peran IMP dan Tokoh dalam masyarakat untuk mendukung KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD diKelurahan/Desa dan Sub PPKBD di dusun	Dinas PPKBP3A
	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga/ Kelompok Usaha Keluarga	Jumlah Keluarga yang mempunyai anak Balita dan Aktif mengikuti BKB	Jumlah Keluarga yang mempunyai Balita aktif mengikuti BKB dibagi Jumlah keluarga yang mempunyai anak Balita	Dinas PPKBP3A
4	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Remaja yang aktif mengikuti PIK-R/M	Jumlah remaja Aktif mengikuti Pik R/M dibagi jumlah remaja yang ada lingkungan Pik-R/M	Dinas PPKBP3A
5	Meningkatnya peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan yang ada didata	Dinas PPKBP3A
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Jumlah Pekerja perempuan di lembaga Swasta dibagi jumlah pekeja perempuan yang ada didata	Dinas PPKBP3A
6	Peningkatan kepastian hukum masyarakat dan produk hukum yang memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat	Persentase Kasus KDRT dan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak terselesaikan	Jumlah KDRT yang telah diselesaikan dibagi jumlah yang melapor	Dinas PPKBP3A
	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Rasio KDRT	Jumlah KDRT yang ada dibagi rumah tangga	Dinas PPKBP3A
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Jumlah pengaduan yang diselesai di bagi jumlah yang melapor	Dinas PPKBP3A
	Meningkatnya Efektivitas kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengarustamaan gender	Jumlah berapa kali pembinaan dilaksanakan	Dinas PPKBP3A

12. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)	$63,20\% \times \text{produksi padi (Gkg)}$	Dinas Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya keragaman Konsumsi Pangan Yang Sehat dan Aman	Skor PPH Konsumsi	$\% \text{ AKG} \times \text{bobot}$	Survey oleh Dinas Ketahanan Pangan

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan kebersihan dan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (M}^3\text{)}}{\text{Volume produksi sampah (M}^3\text{)}} \times 100$ %	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		Berkurangnya serakan sampah	$\frac{\text{Volume produksi sampah (M}^3\text{)}}{\text{Sarana dan prasarana}} \times 100\%$	
2	Pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki/tidak memiliki dokumen lingkungan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksana dokumen lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang diawasi}}{\text{Jumlah dokumen lingkungan}} \times 100 \%$	Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan
3	Tercapainya laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Terlaksananya akreditasi laboratorium lingkungan hidup ke Komite Akreditasi Nasional (KAN)	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen yang tersedia}} \times 100\%$	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya pelayanan masyarakat terkait penanganan pengaduan dan	Persentase pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau	$\frac{\text{(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti)}}{\text{(Jumlah pengaduan)}} \times 100\%$	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

sengketa dibidang lingkungan	kerusakan lingkungan		
------------------------------	----------------------	--	--

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	Penerbitan Dokumen Kependudukan kurang dari 2 hari	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
			Jumlah seluruh Penerbitan Dokumen Kependudukan tahun (x)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		Tingkat Penerbitan Dokumen Kependudukan kurang dari 2 hari terhadap Dokumen Kependudukan yang diterbitkan tahun (x)	Tingkat Penerbitan Dokumen Kependudukan kurang dari 2 hari terhadap Dokumen Kependudukan yang diterbitkan tahun (x) $= (\text{Doki1} + \text{Doki2} + \text{Doki3} + \text{Doki4} + \text{Doki5} + \text{Doki6} + \text{Doki7} + \text{Doki*}) / 8$	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
			Doki1 = Penerbitan Kartu Keluarga = Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

		<p>Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga tahun (x) Doki2 =Penerbitan KTP-el = Jumlah Penerbitan KTP-el kurang dari 2 hari tahun (x) x 100% Jumlah Penerbitan KTP-el tahun (x)</p>	Asahan
		<p>Doki3 =Penerbitan Surat Keterangan KTP-el = Jumlah Penerbitan Surat Keterangan KTP-el kurang dari 2 hari tahun (x) x 100% Jumlah Penerbitan Surat Keterangan KTP-el tahun (x)</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		<p>Doki4 =Penerbitan SKPWNI = Jumlah Penerbitan SKPWNI kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		<p>Jumlah Penerbitan SKPWNI tahun (x) Doki5 =Penerbitan Akta Kelahiran = Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		<p>Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran tahun (x) Doki6 =Penerbitan Akta Kematian = Jumlah Penerbitan Akta Kematian kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		<p>Jumlah Penerbitan Akta Kematian tahun (x) Doki7 =Penerbitan Akta Perkawinan = Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan

			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan tahun (x) Doki8 =Penerbitan Akta Perceraian = Jumlah Penerbitan Akta Perceraian kurang dari 2 hari tahun (x) x 100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
			Jumlah Penerbitan Akta Perceraian tahun (x)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
2.	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian tahun (x)	Persentase Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting valid dan	Jumlah Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting valid dan terbarukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		terbarukan	x 100%	
			Jumlah Data Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
3	Membangun ware house Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan	Ada/Belum Ada, ware house Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan	Ada/Belum Ada, ware house Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
		Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
4	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai evaluasi AKIP		Inspektorat Kab. Asahan

		Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti		BPK / Inspektorat Prov./ Inspektorat Kab. Asahan
	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas (IKM)	Kependudukan Indeks Kepuasan Masyarakat	NRR per Responden = Jumlah Nilai Responden / Jumlah Responden NRR tertimbang per unsur = NRR per Responden / 12 Nilai Indeks = Jumlah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
			NRR tertimbang per unsur IKM = Nilai Indeks x (100%; 4 indeks)	

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah desa yang menghasilkan PADesa (Desa)	Jumlah desa yang menghasilkan PADesa	Dokumen Renstra dan Renja OPD
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Persen)	$(X/Y) \times 100 \%$ X = Jumlah swadaya Y = Jumlah program pemberdayaan	Dokumen Renstra dan Renja OPD

3	Meningkatkan kapasitas kinerja pemerintahan desa	Jumlah desa yang mampu mengelola keuangan desa tepat waktu (Desa)	Jumlah desa yang mampu mengelola keuangan desa tepat waktu	Dokumen Renstra dan Renja OPD
---	--	---	--	-------------------------------

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terciptanya kondisi transportasi yang selamat (safety), nyaman (comperable), serta terkendali.	Angkutan umum yang lulus uji persyaratan teknis dan laik jalan	$\frac{\text{Jumlah angkutan yang lulus uji}}{\text{Jumlah angkutan yang melakukan uji berkala}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase jalan kewenangan Kabupaten dengan tingkat Pelayanan B	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan dengan tingkat Pelayanan B}}{\text{Jumlah ruas jalan Kabupaten Asahan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase jumlah kecelakaan fatal	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan fatal}}{\text{Jumlah kecelakaan yang terjadi}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Jumlah titik simpul kemacetan	Penurunan jumlah titik simpul kemacetan di ruas jalan Kabupaten Asahan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah total skor/jumlah pertanyaan}}{\text{Skor alternatif jawaban terbesar}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kinerja dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait Dalam Bidang Komunikasi, Penginformasi dan Media Massa	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kerja Sama dengan Media Massa}}{\text{Target Kinerja Dengan Media Massa}}$	Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD
2	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Ketersediaan radio lokal	Jumlah radio lokal	Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

3	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya bidang teknologi dan komunikasi	Ketersediaan website milik pemerintah	Jumlah website milik pemerintah	Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD
4	Ketersediaan akses internet Kab.Asahan	Ketersediaan akses internet Kab.Asahan	(Jumlah Bandwidth)	Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD
5	Ketersediaan system informasi Kab.Asahan yang berbasis teknologi	Ketersediaan system informasi Kab.Asahan yang berbasis teknologi	Jumlah aplikasi e-government Kab.Asahan	Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

18. DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif x 100 %	Dinas Kopdag
			Jumlah seluruh koperasi	
2	Meningkatnya usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Dinas Kopdag
3	Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Perdagangan x 100 %	Dinas Kopdag
			Jumlah total PDRB	

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Asahan	Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN (Perusahaan)	Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN tahun 2019 / Jumlah target investor berskala nasional PMA dan PMDN tahun 2019) x 100%	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal

		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN (Triliyun Rupiah)	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN tahun 2019 / Jumlah target nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN tahun 2019) x 100%	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kapabilitas kinerja pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Laporan IKM
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan DPMPTSP	Nilai hasil evaluasi AKIP	Skala Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase tindaklanjut hasil temuan BPK/ Inspektorat	Dokumen temuan BPK/Inspektorat yang sedang atau telah ditindaklanjuti

20. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan keterampilan pemuda	Jumlah tersangka pemuda terlibat narkoba	Jumlah tersangka pemuda terlibat narkoba di Kabupaten Asahan	BNN
		Jumlah pemuda yang berprestasi dibidang pemuda pelopor	Jumlah pemuda yang berprestasi dibidang pemuda pelopor di Kabupaten Asahan	Disporapar
		Jumlah wirausaha pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha pemuda di Kabupaten Asahan	
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali disetiap kejuaraan	Disporapar
		Jumlah atlet pelajar berprestasi	Jumlah atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Asahan	
3.	Meningkatnya kualitas Pariwisata	Tingkat kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisata ke Kabupaten Asahan	

21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Persentase Jumlah Pemustaka (Usia 5-59 Tahun)	Jumlah pengunjung dibagi jumlah penduduk (usia 5-59 tahun) x 100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Terwujudnya penyelamatan, pelestarian dan tertib arsip daerah	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	Jumlah arsip statis yang didapatkan dibagi jumlah rencana arsip statis yang akan didapatkan x 100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Meningkatnya kesadaran kearsipan dan kompetensi pengelolaan arsip	Persentase peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi dibagi jumlah SDM yang direncanakan mengikuti peningkatan kompetensi x 100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

22. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan Asahan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Asahan	Dinas Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	jumlah (ton) ikan yang dihasilkan melalui kegiatan usaha budidaya perikanan	Dinas Perikanan
2	Asahan Sebagai sentra Benih	Jumlah Produksi benih (ekor)	jumlah (ekor) benih ikan yang dihasilkan melalui kegiatan usaha budidaya perikanan	Dinas Perikanan
3	Meningkatnya ketersediaan ikan	Tingkat Konsumsi Ikan	Rasio antara ketersediaan ikan dibandingkan dengan jumlah penduduk	Dinas Perikanan

23. DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan (Ton) GKG	Luas Panen X Produktivitas	Dinas Pertanian Kabupaten Asahan
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha) GKG	Produksi / Luas Panen	Dinas Pertanian Kabupaten Asahan
2	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Produktivitas X Luas Tanaman Menghasilkan	Dinas Pertanian Kabupaten Asahan
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha/Tahun)	Jumlah Produksi / Luas Tanaman Menghasilkan	Dinas Pertanian Kabupaten Asahan
3	Mendorong pertumbuhan produk yang berdaya saing	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	NTB (i)	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi hasil daging untuk memenuhi kebutuhan protein hasil hewan	Jumlah Produksi Daging	Jumlah ternak yang dipotong X berat Karkas	Statistik Peternakan
2	Meningkatnya hasil peternakan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan daging, mutu dan keamanan	Populasi Sapi Potong	Jumlah Populasi Sapi Potong	Statistik Peternakan
		Populasi Kerbau	Jumlah Populasi Kerbau	
		Populasi Kambing	Jumlah Populasi Kambing	

	Populasi Domba	Jumlah Populasi Domba	
--	----------------	-----------------------	--

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan	Jumlah Aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang masuk dokumen RKPD/ Jumlah seluruh aspirasi masyarakat melalui musrenbang Kabupaten x 100%	BAPPEDA KAB.ASAHAN
		Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD $= (Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$	
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RPJMD $= (Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$	
		Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RKPD		
2	Terlaksananya program pembangunan yang	Persentase program pembangunan yang	$(\text{Jumlah program APBD}) / (\text{Jumlah program RKPD}) \times 100\%$	BAPPEDA KAB.ASAHAN
	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		
3.	Data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data yang akurat untuk perencanaan pembangunan	$(\text{Jumlah data yang akurat}) / (\text{Jumlah total data}) \times 100\%$	BAPPEDA KAB.ASAHAN
4.	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai evaluasi AKIP		INSPEKTORAT KAB.

	pelayanan Bappeda			ASAHAN
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti		INSPEKTORAT KAB. ASAHAN
	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		BAPPEDA KAB.ASAHAN

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas dukungan manajemen internal	Persentase administrasi kepegawai yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah Administrasi Kepegawaian diterbitkan tepat waktu	BKD Kab.Asahan
2	Tercapainya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Diklat Peningkatan Kompetensi	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Tehnis dan Fungsional	Jumlah PNS yang Memiliki Sertifikat Diklat Tehnis dan Fungsional dibagi dengan Jumlah PNS seluruhnya x 100%	BKD Kab. Asahan
		Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Manajerial / Struktural	Jumlah PNS yang Memiliki Sertifikat Diklat Manajerial dibagi dengan jumlah Pejabat Struktural x 100%	BKD Kab. Asahan
3	Tersedianya Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Selesai Tepat Waktu dibagi dengan Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai	BKD Kab. Asahan
		Jumlah Pegawai Pensiun Tepat Waktu	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai	BKD Kab. Asahan

4	Terpenuhinya Data Pegawai yang Akurat	Persentase Keakuratan Data Pegawai	Jumlah Pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai seluruhnya	BKD Kab. Asahan
---	---------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------

27. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	lamanya waktu penyusunan RAPBD	Tanggal penyampaian RAPBD 28 Desember 2017 Nomor 11 Tahun 2017 tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPA 13 Januari 2017	BPKAD
		Persentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	(Realisasi Pendapatan/Anggaran Pendapatan) x 100 %	BPKAD
		Persentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	(Realisasi Belanja / Anggaran Belanja) x 100 %	BPKAD
		Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	(Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu / seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan) x 100 %	BPKAD
2	Tertibnya Administrasi dan Dokumen aset sebagai dasar penilaian dan perhitungan penyusutan aset	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kab.Asahan	(Jumlah rincian total BMD di SIMDA barang / Data aset pada Neraca Pemerintah Kab.Asahan di SIMDA keuangan) x 100 %	BPKAD
		Jumlah Pemasangan Plank Aset	Jumlah Pemasangan Plank Aset Setiap Tahunnya	BPKAD

		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Asahan menjadi Kategori / nilai yang diperoleh	BPKAD
--	--	--	--	-------

28. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya target penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	$\frac{(\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun } (x) - @\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun } (x-1)) / (\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun } (x-1)) \times 100\%}{}$	Bidang Pengendalian dan Operasional dan Bidang Penagihan
2	Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak daerah	Prosentase peningkatan ketaatan wajib pajak yang membayar pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah WP yang Membayar Pajak Daerah Tahun } (x) - @\text{Jumlah WP yang Membayar Pajak Daerah Tahun } (x-1)) / (\text{Jumlah WP yang Membayar Pajak Daerah Tahun } (x-1)) \times 100\%}{}$	Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Bidang Penagihan
3	Meningkatnya insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan	Jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif (pengurangan) pajak	$\frac{\text{Jumlah WP yang Mendapatkan Pengurangan Pajak}}{}$	Bidang Pengendalian dan Operasional

29. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama	Jumlah Konflik SARA Bernuansa Agama	$\frac{\text{Jumlah Konflik SARA yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik SARA}} \times 100\%$	Badan kesbangPol
2	Meningkatnya Pemahaman & Sikap Masyarakat tentang	Persentase Angka Konflik IPOLEKSOSBUDHAMKAN	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Konflik yang di Tangani}} \times 100\%$	Badan kesbangPol

	Nilai-Nilai Kebangsaan			
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Politik dalam Negeri	Angka Persentase Masyarakat dalam Menggunakan hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Jumlah LSM/Orkemas yang Aktif/Jumlah LSM/Orkemas yang Terdaftar x 100%	Badan kesbangPol

30. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (Tersedianya Desa Tangguh Bencana)	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana/Jumlah Desa Rawan Bencana X 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana (Tertanganinya Kejadian Bencana)	Persentase Kejadian Tanggap Darurat Yang Tertangani	Jumlah Kejadian Bencana Yang Tertangani/Jumlah Kejadian Bencana x 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Persentase Korban Bencana Yang diberikan Bantuan melalui BPBD Kabupaten Asahan	Jumlah Distribusi Logistik ke Korban Bencana/Jumlah Korban Bencana x 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Tersedianya Analisis Jenis Bencana (Peta)	Persentase Ketersediaan Analisis Jenis Bencana	Jumlah Analisis Bencana Yang Tersedia/Jumlah Jenis Bencana x 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan penanggulangan bencana	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan penanggulangan bencana		
		Nilai hasil evaluasi AKIP		
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang		

		ditindaklanjuti		
--	--	-----------------	--	--

31. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	$(\text{Nilai terendah} \times \text{jumlah pertanyaan}) + (\text{Nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan}) / 2$	kuesioner pasien
2	Meningkatnya Kapasitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Pengembangan Jenis Layanan Kepada Masyarakat	1. Bed Occupancy Ratio (BOR)	$\text{BOR} = (\text{jumlah hari perawatan} / (\text{jumlah tempat tidur} \times \text{periode kerja})) \times 100\%$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap
		2. Average Length of Stay (AvLOS)	$\text{LOS} = \text{jumlah lama dirawat} / \text{jumlah pasien keluar}$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap
		1. Turn Over Interval (TOI)	$\text{TOI} = ((\text{jumlah tempat tidur} \times \text{periode hari}) - \text{jumlah hari perawatan}) / (\text{jumlah pasien keluar})$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap
		2. Bed Turn Over (BTO)	$\text{BTO} = \text{jumlah pasien keluar} / \text{jumlah tempat tidur}$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap
		3. Net Death Rate (NDR)	$\text{NDR} = (\text{jumlah pasien meninggal} - 48 \text{ jam setelah dirawat}) / (\text{jumlah pasien keluar}) \times 100\%$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap
		4. Gross Death Rate (GDR)	$\text{GDR} = \text{jumlah pasien meninggal seluruhnya} / (\text{jumlah pasien keluar} \times 100)$	Rekapitulasi catatan harian pasien rawat inap

32. KECAMATAN (25 KECAMATAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang baik dan tepat waktu di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang dilaksanakan dibagi seluruh urusan pemerintahan umum di Kecamatan x 100%	Kasi Pemerintahan
		Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan tepat waktu	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan dibagi seluruh urusan pemerintahan umum di Desa/ Kelurahan x 100%	Kasi Pemerintahan
		Persentase temuan pemeriksaan yang di tindak lanjuti	Tindak lanjut pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh temuan x 100%	Kasi Pemerintahan
2.	Terlaksananya perencanaan Pembangunan yang aspiratif di Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan yang ditampung dalam Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Desa / Kelurahan dibagi Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan x 100 %	Kasi Pembangunan Masyarakat

		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam Musrenbang Kabupaten	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten dibagi Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam yang diusulkan pada	Kasi Pembangunan Masyarakat
			musrenbangkab x 100 %	
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat desa/kelurahan yang mandiri dibagi Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang diberdayakan/dibina x 100 %	Kasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase Peringatan Keagamaan Aktif	Jumlah peringatan keagamaan yang dilaksanakan/ jumlah total peringatan keagamaan x 100%	Kasi Kesejahteraan Sosial
4.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dpt diselesaikan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk x 100 %	Kasi Keamanan dan ketertiban

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA